

# PENDIDIKAN BERWAWASAN MORAL MENGHASILKAN SDM ANTI KORUPSI

Oleh:  
Drs. Arif Rahman, M.Pd.

## *Abstract*

*Multi-dimension crises including moral crisis (corruption) indicate the failure of education. The lack of transparency and accountability in the field of politics and economy worsens the condition. Various research results show that corruption abolition should instigate from self-commitment at individual level. Each individual anticorruption commitment becomes the underpinning for collective commitment. Education in this case may become the medium for the collective commitment conscientization since commitment as a main characteristic of mature human being can be nurtured through education. Education thus makes humans to be more fully human. The state of being "fully human" itself represents the anticipated objective of education. What needs to be noted is that education may become the development instrument for each individual and community if utterly facilitated with good morality of educators. Education might not breed corrupt human beings if the educators themselves are not corrupt.*

*Keyword: education, moral, corruption*

## **A. Pendahuluan**

Saat ini Indonesia dapat dikatakan sedang berada dalam kondisi kritis. Kondisi krisis saat ini bukan saja krisis ekonomi tapi juga krisis moral. Porno-grafi, porno-aksi, kolusi, korupsi, dan nepotisme paling dominan mewarnai media cetak maupun media elektronika, ini sebagai bukti bahwa ada krisis moral di negeri ini. Krisis moral yang saat ini sedang terjadi sedikit banyak merupakan produk praktek pendidikan di masa silam, begitupun dengan perilaku korup. Padahal pendidikan diyakini merupakan upaya strategis dalam mengatasi moral korup untuk jangka panjang.

Sejak Indonesia merdeka, pendidikan belum pernah berada pada posisi utama strategi pembangunan dalam kebijakan politik negara, pendidikan hanya dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan para penguasa. Sesuai dengan survey yang dilakukan *Transparency International*, Indonesia termasuk dalam daftar negara-negara terkorup di dunia. Lembaga itu mencatat, dari tahun 2002 hingga 2004 Indonesia masih menempati daftar negara-negara terkorup di dunia dengan indeks persepsi korupsi (IPK) terus di bawah 2,0 dari rentang 0-10. Kondisi ini menurut Tilaar (2002: 5) merupakan salah satu kegagalan pendidikan nasional serta tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi dan politik.

Perlu disadari bahwa mendidik ibarat seorang sedang membuat garis lurus pada sebuah kertas, sedikit saja miring dalam menggaris maka akan semakin jelas terlihat kemiringan garis tersebut.. Kesalahan dalam mendidik akan dirasakan akibatnya setidaknya 9 tahun ke depan. Kesalahan pendidikan di masa lalu atau masa sekarang akan semakin jelas nampak seiring dengan berjalannya waktu. Penyakit korup yang sedang diderita oleh sebagian besar masyarakat merupakan akibat dari kesalahan sistem pendidikan secara keseluruhan, baik yang formal, non formal maupun yang in formal.

Institusi-institusi pendidikan cenderung mengajarkan kepada anak didiknya pengetahuan, keterampilan, dan sedikit sikap, kurang memberikan pendidikan mengenai

etika moral yang biasanya hanya ditugaskan kepada pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Sebenarnya semua bidang ilmu memiliki nilai etik dan seharusnya nilai etik ini diberikan secara proporsional pada saat mengajarkan substansi materi keilmuan. Di rumah kita sering melihat betapa mudahnya orang tua mengajarkan kebohongan pada anaknya, jarang terlihat orang tua menanamkan kejujuran, dengan selalu berperilaku jujur pada anak. Di lingkungan bermain juga tidak menanamkan kejujuran, terlebih tayangan-tayangan televisi yang penuh dengan tayangan kekerasan, perselingkuhan, mistik, dan sebagainya. Kondisi seperti tersebut di atas banyak memberikan andil dalam membentuk sikap korup.

Menanggulangi permasalahan korupsi sangatlah sulit, bagaikan mengurai benang kusut tanpa ujung. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan harus dilakukan melalui komitmen diri sendiri yang bersandar pada kekuatan dialog. Dialog ini diperlukan guna membangun komitmen kolektif dalam upaya menciptakan interaksi yang bermakna. Dialog memiliki muatan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas interaksi yang bersumber dari nilai-nilai kebenaran absolut dan universal, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, kemerdekaan, keseimbangan, kesetaraan, dan kebebasan (Adler, 1988;79) sehingga dimiliki dan diterima semua komponen sistem sosial.

Akar masalah korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan terletak pada ketiadaan aturan dan undang-undang, tapi lebih disebabkan pada masih lemahnya budaya hukum, mengacu pada kesadaran hukum masyarakat (Friedmann, 1970), yang menjadi basis dalam pembentukan struktur sosial kita. Dalam upaya mendorong lahirnya perubahan sosial, Friedman (1985 dan 1990) lebih cenderung menaruh harapan pada pentingnya kultur hukum eksternal (kondisi, respons, pendapat, kepentingan, dan tekanan yang dilakukan oleh kelompok sosial lain yang lebih luas), daripada kultur hukum internal (ide-ide dan praktek yang dilakukan para penganut-profesional-hukum).

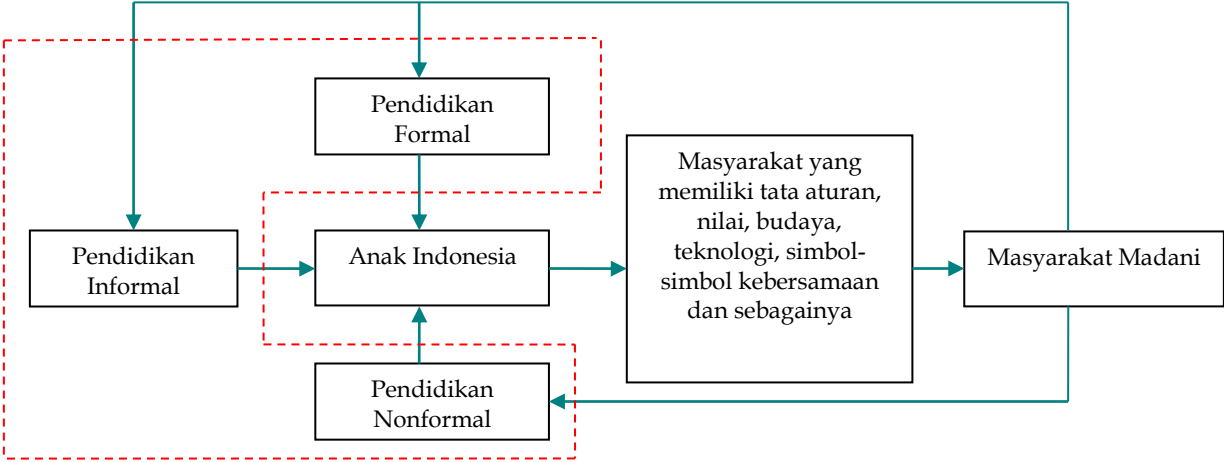
Tulisan ini mencoba memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi korupsi melalui pendidikan, untuk keperluan tersebut penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Apa yang dimaksud dengan Moral dan Korupsi? Apa yang dimaksud dengan bangsa anti korupsi? Bagaimana pendidikan dapat menanggulangi korupsi?

## **B. Hakikat Pendidikan**

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya manusia dewasa untuk memanusiakan manusia. Kedewasaan manusia sendiri merupakan hasil yang diantisipasi dalam aktivitas mendidik. Dipersyaratkan manusia dewasa yang mendidik karena manusia dewasa adalah manusia yang sudah mengalami proses pendidikan ia dapat menolong dirinya sendiri dan orang lain serta memiliki kepribadian yang utuh. *Langeveld* dalam Kartono (1997:22) menyatakan, bahwa pendidikan mempunyai tujuan, sepanjang pendidiknya memiliki tujuan dalam hidupnya. Oleh karena itu pendidikan erat sekali dengan karakter pendidik. Semakin pendidik tersebut tidak menyadari tujuan hidupnya, dan semakin tidak jelas serta semakin fragmentaris terpotong-potong pribadi pendidik dalam mengenali tujuan hidupnya, maka semakin tidak jelas pula arah perilaku pendidik tersebut. Oleh karena itu, menjadi semakin buram pula tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Karena itu sangat penting bagi pendidik untuk menyadari benar apa sebenarnya tujuan hidupnya, supaya ia bisa memahami tujuan pendidikan yang dikenakan kepada anak didiknya.

Tujuan pendidikan sendiri tidak terlepas dari hakekat manusia yang sesungguhnya yaitu sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dalam kelompok. Dalam kebersamaannya manusia memiliki tata aturan, nilai, budaya, teknologi, simbol-simbol

kebersamaan dan sebagainya yang mesti dipertahankan maupun dikembangkan. Tugas mempertahankan dan mengembangkan tata aturan, nilai, budaya, teknologi, simbol-simbol kebersamaan dan sebagainya itu diserahkan kepada institusi pendidikan, baik yang formal, non formal maupun yang informal. Adapun peran institusi pendidikan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1  
Peran Institusi-institusi Pendidikan

Banyak negarawan melihat pendidikan sebagai instrumen pokok bagi modernisasi, yaitu modernisasi di bidang politik, aspek sosial dan sektor ekonomi. Di bidang politik, pendidikan terutama digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik, dan kesadaran bertanah air serta bernegara. Pada sektor sosial, pendidikan diharapkan ikut mempertinggi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kemudian di disektor ekonomi, pendidikan diminta untuk menghasilkan tenaga terampil bagi sektor industri, perdagangan, manajemen dan pembangunan.

Banyak politisi, melihat pendidikan sebagai faktor politik dan kekuatan politik, karena politik merupakan *causa prima* (penyebab pertama) dari semua kejadian yang berlangsung di suatu wilayah negara. Analog dengan konsep ini, kebijakan pendidikan, strategi pendidikan dan operasionalisasi pendidikan banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan politik. Maka hak untuk memperoleh pendidikan dan kesejahteraan bagi rakyat itu juga ditentukan oleh keputusan kekuatan politik, dan jelas memerlukan lebih banyak aktivitas politik, baik dari pemerintah maupun dari rakyat. Dengan pesatnya pertumbuhan demokrasi politik, demokrasi juga dijadikan prinsip pendidikan, norma pendidikan, dan politik pendidikan. Prinsip demokrasi tersebut menyebabkan adanya kemungkinan bahwa aspirasi, harapan dan kebutuhan rakyat bisa diikutsertakan sebagai bahan baku untuk menentukan kebijakan pendidikan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pendidikan itu berdasarkan rasa tanggungjawab etis selaku warganegara dan tanggungjawab ekonomis; serta sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing. Bukan hanya para sarjana dan pemimpin-pemimpin politik saja yang kompeten memikirkan dan memecahkan permasalahan pendidikan dan krisis pendidikan. Karena pada dasarnya tidak ada seorang yang dewasa yang buta secara mutlak mengenai pendidikan.

Setiap individu pernah diasuh dan dididik oleh orang tua dan lingkungannya, pasti mempunyai kriteria kebenaran dan kriteria kemanfaatan mengenai praktek pendidikan, yang telah diuji oleh pengalaman sepanjang hidup mereka, bahkan sepanjang sejarah manusia. Pada intinya mereka memiliki kriteria baku mengenai *the ultimate good* (kebaikan/kebenaran akhir) dari aktivitas mendidik anak keturunan manusia dan dari tujuan pendidikan.

### C. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional kita dijabarkan dari tujuan negara, yang pada hakekatnya menjadi kondensasi dari tujuan hidup segenap rakyat Indonesia. Artinya, harapan dan keinginan rakyat yang menghendaki jenis-jenis pendidikan tertentu dan sangat diperlukan sebagai instrumen pemecah kesulitan hidup itu benar-benar menjadi basis konstitusi bagi ditegakkannya sistem pendidikan. Adapun fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pandangan demokratis universal, melihat tujuan pendidikan adalah bersifat sosial atau secara tak langsung membentuk sebuah masyarakat demokratis dan sebuah pemerintahan dunia yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral humanisme ilmiah, moral yang bersifat *biopsiko-sosiochonomik* yang mengacu pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan dan gagasan-gagasan manusia yang tumbuh dalam peradaban manusia. Tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat individual adalah mengembangkan kepribadian yang didalamnya membantu pertumbuhan intelektual dan moral.

Pertumbuhan intelektual bertujuan untuk mencapai kematangan berpikir yang mencerminkan kebajikan-kebajikan utama dalam kemampuan ilmiah yang mempunyai ciri: (a) berpikir jernih, (b) penyimpulan yang mantap dan tepat, (c) mempunyai kesesuaian faktual dan reabilitas, (d) objektivitas, (e) rasionalitas dalam bertindak laku, (f) rasionalitas moral, yaitu: setia pada prinsip keadilan, kesamaan dan bebas dari paksaan dan kekerasan. Perkembangan moral bertujuan agar individu memiliki: sikap ilmiah, sikap humanis, sikap sosial berdasarkan rasa cinta kepada sesama manusia.

Pada dasarnya pendidikan merupakan upaya yang sistematis untuk kemerdekaan yang permanent dari macam-macam keterbelengguan (terbelenggu oleh kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, penindasan, watak korup dan lain-lain), sehingga individu bisa menjadi:

- pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan penentuan tempatnya (*plaatsbepaling*, tahu *unggah-ungguh* fungsi dan tugas kewajibannya);
- bertanggung jawab susila, mampu mandiri; ringkasnya menjadi manusia seutuhnya.

Atas dasar itu maka pendidikan seyogyanya dapat mendorong anak manusia menjadi pribadi yang sadar (*corpo consciente*), yang menghayati relasi dirinya dengan dunia sekitar dan dengan Tuhannya. Di samping itu dapat mendorong dirinya untuk selalu berdialog dan bekerjasama dengan orang lain. Dengan demikian ada pertemuan antara manusia dengan perantaraan dunia/alam lingkungan sekitar, guna mengangkat martabat insaninya, berkat hasil pendidikan (bimbingan, tuntunan, asuhan edukatif).

Selanjutnya pendidikan wajib memberikan bentuk pengajaran, keterampilan, dan prilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, tuntutan jamannya, serta mempertahankan nilai-nilai kebenaran absolut yang datang dari Tuhannya. Dengan

demikian pendidikan akan menjadi instrumen pembangunan bagi pribadi manusia dan bagi masyarakat. Untuk memenuhi predikat tersebut, pendidikan harus:

- Berfungsi dalam realitas nyata dalam menggugah daya hidup dan kemajuan.
- Bisa ikut menjawab masalah-masalah lokal, regional, dan nasional, pada *niveau* sosial budaya yang berbeda-beda.
- Merefleksikan diri sendiri untuk menemukan kembali identitas diri/jati diri. Untuk kebutuhan ini maka pendidikan sangat membutuhkan pendidikan moral dan pendidikan sosial guna menumbuhkan kembangkan rasa cinta pada tanah-air dan bangsa sendiri; disamping menumbuhkan kembangkan rasa pengabdian untuk mencapai kesejahteraan bersama dan kebaikan bagi segenap umat manusia.

Refleksi diri dan penemuan jati diri itu sangat penting bagi kesadaran manusia, agar dia tidak menjadi makhluk *amorf* tanpa bentuk, dan lupa daratan tanpa kesadaran, sebab tidak tahu lagi awal dan akhir keberadaannya (*purwadaksi*-nya). Refleksi diri dan pengenalan jati diri mendorong orang untuk menyadari hak, kewajiban dan status kedudukannya di tengah kaum serta bangsanya. Eksistensi diri itu harus diperjuangkan dalam hidupnya secara terus menerus sampai akhir hayatnya, lewat proses belajar dan mendidik diri sendiri (manusia dewasa). Sedangkan refleksi mengenai lingkungan diperlukan demi pemanfaatan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan segenap manusia di dunia.

#### **D. Pendidikan Moral**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Nurudin, 2001) moral berarti ajaran baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik buruk dan berakhlak baik. Menurut Immanuel Kant (Magnis Suseno, 1992), moralitas adalah hal kenyanjian dan sikap batin dan bukan sekedar penyesuaian dengan aturan dari luar, baik itu aturan hukum negara, agama atau adat-istiadat. Selanjutnya dikatakan, bahwa kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiannya pada hati nuraninya sendiri. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.

Nampaknya, menurut Hegel, konsep moralitas yang dikemukakan oleh Kant masih “abstrak”, hal ini dikarenakan Kant tidak memperhatikan bahwa manusia memiliki otonomi suara hati yang selalu sudah bergerak dalam ruangan bentukan struktur-struktur sosial yang mewadahi tuntutan-tuntutan moral. Menurut Hegel kebebasan manusia bukan sekedar sikap otonomi batin, melainkan merupakan hakekat seluruh kerangka sosial di dalam manusia merealisasikan diri. Ini berarti bahwa kebebasan harus terungkap dalam tiga institusi yang satu sama lain berhubungan secara dialektis, yaitu: (a) hukum, (b) moralitas individu, dan (c) tatanan sosial moral (“*Sittlichkeit*”).

Dari pandangan Kant dan Hegel ini perbedaannya hanya bersifat relatif, yaitu Hegel menganggap bahwa Kant berlebihan dan abstrak. Menurut Hegel, apabila kehidupan masyarakat didasarkan pada tatanan normatif yang rasional dan menghormati kebebasan, maka subjek tak perlu setiap saat mengeluarkan begitu banyak tenaga batin. Ia dapat mengandalkan tatanan normatif itu. Ia boleh “ikut-ikutan” dengan pandangan serta tatanan moral masyarakat. Akan tetapi hanya tidak berseberangan dengan suara hatinya. Apabila kesadaran moral subjek meragukan tatanan moral sosial itu, maka ia harus secara otonom mencari apa yang sebenarnya menjadi kewajibannya, ia tidak boleh mengikuti apa yang diharapkan oleh lingkungannya (Magnis Suseno, 1992). Selaras dengan pendapat tersebut, Kattsoff (1996) menambahkan bahwa moral seseorang dapat

ditilik dari pandangan subjektivitas (kebenaran menurut pandangan pribadi/hati nurani) dan kombinasi pandangan subjektivitas dengan pandangan objektivitas (kebenaran menurut pandangan pribadi dan orang lain/tatanan nilai masyarakat).

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep moral dari beberapa ahli tersebut maka fenomena lingkungan disekitas kita dengan banyaknya peredaran pornografi dalam berbagai bentuk dan media, pemalsuan, KKN, Korupsi dan berbagai kejahatan moral yang merajalela di dunia sekarang ini tidak akan bisa diberantas hanya dengan hukum dan kekerasan. Malah sebaliknya lambat laun peraturan (hukum) tertulis itu akan terpengaruh dan berubah. Tanpa pendidikan moral yang mengajarkan moralitas, masyarakat akan makin bobrok dan hancur, seperti hancurnya Kekaisaran Romawi yang megah itu oleh kerusakan moralitas mereka. Kita harus kembali pada moralitas pribadi dan mengajarkan semua manusia untuk bertindak sesuai moralitas yang baik. Jika (sebagian atau semua) orang bermoral baik, mau mengikuti kehendak ajaran agama, dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral, maka dunia insya Allah akan berubah kearah yang lebih baik. Pendidikan moral yang menghasilkan moralitas (kesusilaan, kebaikan dan pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum yang telah menjadi ketetapan hati nurani) tersebut menjadi kepemilikan dalam jati diri manusia dan terimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan di sekolah tidak melulu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja tapi memberikan bobot yang lebih pada pendidikan moral yang menyatu dalam pembelajaran mata pelajaran-mata pelajaran lain selain agama dan atau pendidikan moral. Sebab ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa moralitas, juga manusia tanpa moralitas adalah sangat berbahaya. Tanpa moralitas maka manusia cenderung bersifat seperti binatang yang hanya mengumbar hawa napsunya saja.

Untuk mencegah permasalahan tersebut, maka perlu adanya kesadaran dari semua pihak yang terkait dengan melakukan tindakan proaktif, yaitu memberikan pendidikan moral ke dalam masyarakat agar anak-anak sedini mungkin mendapatkan pendidikan moral. Dengan pendidikan moral diharapkan anak memiliki kecerdasan moral yang dapat menunjang pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Petuah atau pendidikan sopan-santun, tatakrama, disiplin, budi pekerti, pendidikan keluarga dan lain sebagainya akan mendasari perilaku dan sikap penampilan serta sikap mental manusia Indonesia. Walaupun hal tersebut sebenarnya sudah mengalami perubahan sejalan dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman. Namun demikian masih banyak pula yang mempunyai nilai-nilai luhur dan baik untuk dipertahankannya.

Perilaku-prilaku *amoral* atau *nonmoral* yang belakangan ini sering terjadi adalah lebih disebabkan ketidakacuhan terhadap harapan kelompok sosial dari pada pelanggaran sengaja terhadap standar kelompok. Dalam hal ini ada empat pokok masalah utama yang perlu dicermati, yaitu:

1. Mempelajari apa yang diharapkan masyarakat dari anggotanya sebagaimana dalam hukum tertulis, kebiasaan dan peraturan. Bagi yang melanggar harus dikenakan sanksi. Tetapi ketika orang yang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme tersebut dapat lolos dari jerat hukum, maka secara tidak langsung membuat moral dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu merosot. Nilai-nilai kebudayaan yang luhur menjadi luntur, karena hukum yang berlaku tidak dapat ditegakkan.
2. Mengembangkan hati nurani. Hal ini terkait erat dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi. Anak hendaknya sejak kecil sudah mendapat contoh atau teladan dari perilaku orang tuanya.

3. Belajar mengakui perasaan bersalah dan rasa malu bila perilaku individu tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Mempunyai kesempatan untuk interaksi sosial untuk belajar apa saja yang diharapkan masyarakat.

Ditinjau dari perkembangannya, moral terjadi dalam dua fase yang berbeda namun saling berhubungan. Fase pertama perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral. Perkembangan perilaku moral itu dapat diperoleh sejalan dengan bertambahnya usia, pendidikan dan pengalamannya, yang berupa hasil dari coba-coba, pendidikan langsung dan identifikasi.

Fase kedua adalah fase belajar tentang konsep moral atau prinsip-prinsip benar dan salah. Konsep moral itu akan berkembang sejalan dengan perkembangan, pendidikan, bertambahnya pengetahuan dan cara berfikir anak. Dengan berkembangnya mental anak, maka anak mampu membedakan benar dan salah, serta bagaimana supaya anak dapat menjeneralisasi atau mentransfer prinsip tingkah laku dari satu situasi ke situasi yang lain.

Dengan mendapatkan pendidikan moral yang sesuai dengan tuntutan komunitasnya, peserta didik akan merasa nyaman dan tidak resah karena tidak mengalami penolakan dari lingkungannya. Hal ini akan sangat menunjang konsep diri, rasa percaya diri sehingga peserta didik tidak akan menunjukkan sikap antisosial dan emosinya pun akan menjadi lebih stabil.

Berdasarkan penelitian beberapa ahli Psikologi (Dwi Yanny, 2003), pengembangan kecerdasan moral erat hubungannya dengan penerapan disiplin. Peserta didik yang mempunyai kecerdasan moral tinggi, akan lebih disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab lebih besar, karena setiap pelanggaran merupakan sesuatu yang "salah" atau "tidak baik" menurut ukuran etika moralnya. Dengan demikian peserta didik cenderung dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang kurang baik.

## **E. Pendidikan, Moral, dan Korupsi**

Pembangunan khususnya pendidikan pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia pada akhirnya akan dapat meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat jika semua *stake-holder* pembangunan memiliki nilai-nilai intrinsik yang tinggi (Kartasasmita, 1996). Tujuan pembangunan dapat terwujud dengan ditunjang oleh berbagai faktor, salah satunya faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang siap untuk menjalankan roda pembangunan adalah manusia yang telah mendapatkan pendidikan, sehingga ia dapat secara cerdas dan terampil membangun bangsanya. Namun yang menjadi persoalan sekarang ini adalah adanya suatu kecenderungan suatu perilaku moral yang kontra produktif. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diperoleh ternyata cenderung berkorelasi secara negatif dengan moral. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang maka moralnya cenderung semakin rendah. Gejala ini menurut Sanusi Uwes (2003) dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, karakteristik personal dari orang yang bersangkutan, seperti: motivasi yang terkait dengan kebutuhan dasar (*basic needs*) atau rendahnya tingkat pendapatan. Fakta lain, yaitu seorang profesor (guru besar) yang mengajar di perguruan tinggi gajinya relatif rendah dibandingkan dengan gaji seorang manajer atau direktur sebuah perusahaan swasta. Honor konsultan asing biasanya dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan konsultan dalam negeri padahal kemampuannya tidak diragukan. Agar tesa tersebut di atas tidak terjadi maka pendidikan moral dalam arti yang lebih luas terus berikan pada semua jenjang pendidikan formal.

Di tingkat dasar dan menengah pendidikan moral sebaiknya diajarkan melalui pembiasaan moral berdasarkan prinsip otonomi fungsional, dengan cara atau proses, yaitu: (a) seseorang menerima nilai-nilai dari luar melalui belajar dari ilmu dan/atau yang diperkenalkan orang lain melalui teladan dan/atau perintah. Nilai-nilai ini merupakan nilai pinjaman yang bersifat instrumental atau dapat dipakai sebagai alat penolong sementara dalam mempertimbangkan apakah suatu tindakan akan dilakukan atau tidak, dan (b) melalui penggunaan nilai-nilai pinjaman yang bersifat sementara berangsur-angsur menjadi nilai-nilai yang diakui sebagai milik sendiri yang mantap tertanam menjadi dasar pertimbangan moral sesuatu tindakan. Peserta didik tidak hanya pasif menerima bantuan, tetapi aktif melakukan latihan dan peniruan. Para pendidik bertugas: (a) melatih intelektual dan vokasional, (b) menyajikan informasi secara sistematis, (c) membimbing. Dalam pendidikan moral sebagai pembentukan kesadaran moral atau pembentukan superego, pendidik berperan sebagai: (a) memberi ganjaran, dan (b) memberi hukuman.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa akar praktek korupsi sangatlah kompleks. Namun demikian, sekalipun akar praktek korupsi di Indonesia amat kompleks, peran pendidikan dalam mengurangi atau menghentikannya adalah strategis. Pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian tulus, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Artinya, pendidikan memiliki dua misi, yaitu:

- Pendidikan harus membuat individu terlibat politik kehidupan bersama.
- Pendidikan harus mengarah kepada pembibitan integritas, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. Integritas mensyaratkan bukan hanya kedewasaan dan kemauan, tetapi keberanian individu mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik.

Dengan mewujudkan dua misi ini (pelibatan politik dan integritas individu), peran strategis pendidikan dalam memerangi korupsi menjadi nyata. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah siap yang mewujudkan misi ini? Tentunya ini semua adalah tugas kita yang merasa menjadi orang baik dan berkehendak baik.

## F. Penutup

Korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan terletak pada ketiadaan aturan dan undang-undang, tapi lebih disebabkan pada masih lemahnya budaya hukum, mengacu pada kesadaran hukum masyarakat yang menjadi basis dalam pembentukan struktur sosial. Budaya hukum yang mengacu pada kesadaran hukum masyarakat perlu ditanamkan sedini mungkin pada semua jenjang pendidikan dan juga pada semua sistem pendidikan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan upaya strategis dalam mengatasi moral korup untuk jangka panjang.

Pada dasarnya pendidikan merupakan upaya yang sistematis untuk membebaskan dari macam-macam keterbelengguan (terbelenggu oleh kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, penindasan, watak korup dan sebagainya) sehingga menghasilkan pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan penentuan *unggah-ungguh* fungsi dan tugas kewajibannya, bertanggung jawab susila, mampu mandiri. Dengan kata lain pendidikan dapat menjadikan anak manusia menjadi pribadi yang sadar (*corpo consciente*), yang menghayati relasi dirinya dengan dunia sekitar dan dengan Tuhannya. Di samping itu dapat mendorong dirinya untuk selalu berdialog dan bekerjasama dengan orang lain.



Selanjutnya pendidikan wajib memberikan bentuk pengajaran, keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, tuntutan zamannya, serta mempertahankan nilai-nilai kebenaran absolute yang datang dari Tuhannya. Dengan demikian pendidikan akan menjadi instrumen pembangunan bagi pribadi manusia dan bagi masyarakat. maksud tersebut akan dapat dicapai kalau pendidikannya memiliki tujuan terutama tujuan hidupnya. Oleh karena itu pendidikan erat sekali dengan karakter pendidik. Pendidikan menghasilkan manusia yang tidak korup kalau pendidikannya tidak memiliki moral korup.

### **Sekilas tentang Penulis**

Drs. Arif Rahman, M.Pd. adalah dosen FT Universitas Negeri Medan dan Dosen Luar Biasa STIA LAN Bandung serta anggota Kajian Sumber Daya Pendidikan di Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pendidikan DEPDIKNAS Jakarta.

### **Referensi**

- Anshori, D. S. (Ed.), (2000), *Menggagas Pendidikan Rakyat - Ototentrisitas Pendidikan dalam Wacana Politik Pembangunan*, Alqaprint, Bandung.
- Fajar, M., *Pendidikan Harus Bisa Membekali Lulusannya Menghadapi Kehidupan*, Harian Kompas Tanggal 15 September 2001.
- Gunawan, F.X. R., (1997), *Pelacur dan Politikus*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Haryatmoko, (2001), *Terorisme, Politik Porno, dan Etika Kenyakinan*, Jakarta, Kompas.
- Hettne, B., (2001), *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasasmita, G., (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, Cides.
- Kartono, Kartini, (1997), *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Letug, T., (2001), *Guru, Doktor dan Profesor*, dipetik dari internet [tletug@yahoo.com](mailto:tletug@yahoo.com) Tanggal 28 September 2001.
- Mudyahardjo, R., (2001), *Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin, (2001), *Komunikasi Propaganda*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Pope, Jeremy, (2003), *Strategi Membrantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia dan Transparency International Indonesia.
- Sobary, M., (2001), *Zaman Sontoloyo*, Harian Kompas Tanggal 2 September 2001.
- Suseno, F. M., (1992), *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta, Kanisius.
- Taruma, T. Kompas Tanggal 22 September 2001.
- Tilaar, H.A.R., (1997), *Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Era Globalisasi. Visi, Misi, dan program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*, Jakarta, Grasindo.